



Pranatan Anyar



Petugas Pengamanan Pilkada Jalani 'Rapid Test'

YOGYA (KR) - Polda DIY dengan unsur terkait, siap mengamankan Pilkada di tiga Kabupaten dengan menerjunkan sebanyak 7.583 personel. Karena masih di tengah pandemi, Polda DIY melakukan *rapid test* kepada anggota pengamanan Pilkada.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto SIK memastikan, anggota Polda DIY yang diperbantukan untuk mengamankan Pilkada, terbebas dari Covid-19. "Sebelum diperbantukan dan digeser ke lokasi yang dijaga, mereka terlebih dahulu menjalani *rapid test*. Selain memastikan kondisi kesehatan anggota, *rapid test* dilakukan agar masyarakat yang dijaga juga tenang," ungkapnya, Sabtu (5/12).

Kabid Humas menegaskan sikap netralitas jajarannya dalam setiap tahapan Pilkada 2020. Tindakan tegas, akan diberikan bagi anggota yang terbukti tidak netral. Kepolisian meminta masyarakat segera melaporkan ke Polda DIY jika mengetahui ada anggota yang tidak netral. "Ada tiga kabupaten di DIY yang melaksanakan

Pilkada 2020 yaitu Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Kami yakinkan kepada masyarakat, bahwa anggota Polri seluruh Polda DIY mengambil sikap netral. Jika menemukan indikasi anggota Polri yang memberi dukungan kepada calon kepala daerah, jangan ragu segera laporkan ke Propam Polda DIY," tegasnya.

Sementara itu Wakapolda DIY Brigjen Pol Slamet Santoso mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Segala bentuk kerawanan, juga telah diantisipasi kepolisian, baik dalam hal kamtibmas maupun potensi gangguan lainnya.

"Semua wilayah yang melaksanakan Pilkada mempunyai tingkat kerawanan masing-masing. Semua sudah kita antisipasi dan harapannya, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen lainnya ikut membantu kepolisian dalam upaya menjaga kamtibmas selama Pilkada," ucap jenderal bintang satu yang pernah menjabat Kapolresta Yogya ini. (Ayu)-f



Personel Polda DIY menjalani 'rapid test' sebelum diterjunkan untuk mengamankan Pilkada. KR-Wahyu Priyanti.

SEBAGAI EVALUASI MENINGKATNYA PENYEBARAN COVID-19

Asita Pahami Kebijakan Pengurangan Cuti Bersama

YOGYA (KR) - Pengurangan jumlah cuti bersama di akhir tahun oleh Pemerintah, tidak dipermasalahkan oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) DIY. Kebijakan tersebut dapat dipahami, sebagai evaluasi terhadap perkembangan Covid-19 yang terus meningkat.

"Pengurangan kita anggap sebagai *warning* dari Pemerintah," ujar Ketua Asita DIY, Hery Setyan, kepada KR, Sabtu (5/12).

Seperti diketahui, Pemerintah mengurangi jumlah cuti bersama pengganti cuti Idul Fitri semua tanggal 28-31 Desember 2020, menjadi hanya tanggal 31 Desember 2020.

Menurut Hery, kebijakan tersebut dianggap langkah positif dari Pemerintah, dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan kebangkitan ekonomi, khususnya sektor pariwisata. Jika jumlah cuti panjang dengan jumlah hari yang banyak, maka Pemerintah mengkhawatirkan terjadinya peningkatan

Covid-19.

"Jadi kita anggap kebijakan yang positif. Untuk keberlanjutan proses *recovery*," ujar Hery.

Ditambahkan, dalam menjaga agar terjadi keberlanjutan usaha pariwisata, memang mengurangi kapasitas baik penumpang bus, tamu hotel dengan tujuan untuk menjaga tidak terjadinya penularan Covid-19 yang lebih luas. Sehingga, dengan pengurangan tersebut, diharapkan aktivitas pariwisata tetap berjalan dengan baik, meski dalam jumlah terbatas.

Dengan pengurangan jumlah cuti, maka memberikan kesempatan bagi hotel mendapatkan jeda waktu la-

nyan yang dapat digunakan untuk melakukan proses kebersihan, dan pemberian desinfektan sejumlah kamar dan ruangan hotel. Sehingga ketika menerima tamu kembali, keadaan hotel menjadi lebih sehat.

Mengenai adanya berita tentang rombongan salah satu sekolah di luar daerah yang tertular Covid-19 setelah mengunjungi Yogyakarta, Hery menjelaskan perlunya penelusuran lebih jauh. Karena belum tentu penularan tersebut terjadi saat mengunjungi destinasi wisata Yogya. Bisa saja saat perjalanan ke Yogya atau setelah dari Yogya. "Bagi kami, jangan mencari kambing hitam," ujar Hery.

Menurutnya, yang penting saat ini para pelaku wisata jangan lengah dengan meningkatnya penyebaran kasus positif Covid-19. Tetap tegakkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan. (Jon)-f

Ganjar Tetapkan Asrama Haji Donohudan Jadi Tempat Isolasi

BOYOLALI (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan Asrama Haji Donohudan (AHD) menjadi tempat isolasi terpusat pasien terkonfirmasi Covid-19 kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), di wilayah Solo Raya. Demikian dikatakan Gubernur Ganjar Pranowo kepada wartawan di Boyolali, Sabtu (5/12). Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo, Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo, Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan sejumlah *stakeholder* di Asrama Haji Donohudan, Ganjar mengatakan, Donohudan siap digunakan untuk karantina Sabtu kemarin.

"Inilah yang kita siapkan pada hari ini, wakil khusus yang ada di Donohudan, jadi dari hasil rapat tadi kita sudah sampaikan bahwa potensi donohudan ini ada 873 peng-

huni," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, fasilitas seperti *laundry* hingga kebersihan yang biasa digunakan ketika musim haji juga siap dimanfaatkan selama AHD menjadi tempat isolasi Covid-19 terpusat. Sementara untuk fasilitas pendukung seperti laboratorium juga disiapkan.

Selain itu, kesiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan juga mulai disiapkan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, Ganjar mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). "AHD mulai hari ini sudah siap untuk menampung mereka yang positif Covid-19 tapi OTG. Mereka cukup dirawat di sini," ujarnya.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jawa Tengah juga membahas ren-

cana penambahan rumah sakit untuk penanganan Covid-19 di Solo. Hal ini untuk menambah jumlah bed isolasi di Solo. Selain itu, secara kontinyu juga dilakukan persiapan untuk tempat isolasi terpusat di wilayah lain, seperti di Banyumas Raya, Pati Raya, dan Pekalongan Raya.

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menambahkan, pihaknya juga meminta kepada Ganjar untuk memerintahkan jajaran kepala daerah di Solo raya agar lebih kompak. Terutama terkait pelaksanaan tes swab dan *tracing*. Solo Raya khususnya harus disiapkan betul RSD, dan memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan swab seperti yang ditargetkan gubernur. Juga harus disiapkan bangunan milik pemerintah untuk melakukan isolasi bagi masyarakat yang OTG. (Bdi)-f

179 Siswa SMK di Jateng Terpapar Covid-19

SEMARANG (KR) - Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengungkapkan, telah terjadi kluster Covid-19 yang sangat memprihatinkan di SMK Negeri Jateng yang saat ini sedang melakukan uji coba belajar tatap muka. Dari 223 siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, 179 siswa di antaranya terpapar positif Covid 19.

Bambang mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Sabtu (5/12). Sebelumnya, pada Jumat (4/12), jumlah siswa yang dilaporkan positif Covid-19 baru 17 siswa. Lima siswa di antaranya dinyatakan sudah negatif dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun perkembangan di hari berikutnya, setelah

hasil swab keluar, ternyata jumlah positif meningkat menjadi 179 siswa.

Dengan kenyataan tersebut, Bambang meminta kepada Gubernur Ganjar Pranowo untuk menunda pelaksanaan belajar tatap muka untuk semua siswa di Jawa Tengah. Ganjar diminta agar lebih fokus dalam menekan penyebaran Covid-19. Bambang berharap, munculnya kluster baru di SMK Negeri di Jateng bisa dijadikan pelajaran karena jumlahnya tidak sedikit. "Protokol kesehatan, khususnya 3M yaitu memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan harus lebih ditekankan lagi," tegas Bambang yang akrab disapa Bambang Kribo ini. (Bdi)-f

PEMULIHAN EKONOMI DI SAAT PANDEMI Hati-hati Ambil Kebijakan Parekraf

KULONPROGO (KR) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan Pemkab Kulonprogo dan pihak terkait agar berhati-hati dalam mengambil langkah upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) pada masa pandemi Covid-19 ini. Penerapan sekaligus kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prokes) harus betul-betul diperhatikan sehingga rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Hal itu disampaikan Abdul Fikri saat Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI kunjungan kerja ke Taman Budaya Kulonprogo, Kalurahan/Kapanewon Pengasih, Jumat (4/12). Jajaran Komisi X menekankan Pemkab dan para pelaku wisata agar tetap memperhatikan prokes di destinasi wisata.

"Pengetatan penerapan protokol kesehatan diperlukan demi menjaga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang saat ini sedang menunjukkan kebangkitan pascaterpuruk dampak pandemi Covid-19," jelasnya.

Ditegaskan, akibat Covid-19 seluruh destinasi wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sempat mati, sehingga berdampak terpuruknya perekonomian masyarakat. Padahal kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap devisa negara cukup besar. Sebelum pandemi Covid-19, dua sektor tersebut telah mengalahkan capaian devisa dari sektor lain seperti minyak, gas, batubara dan kelapa sawit.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi X membentuk dua panja, yakni Panja Pemulihan Pariwisata dan Panja Penguatan Ekonomi Kreatif. Anggota Komisi X dari DIY Esti Wijayanti menegaskan, upaya pengembangan atau menggiatkan kembali sektor pariwisata saat ini harus mengacu prokes dan dipatuhi semua pihak. Langkah-langkah Pemda DIY dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di destinasi wisata sudah tepat.

Bupati Kulonprogo Sutedjo menegaskan, pihaknya terus berupaya menata seluruh aspek kehidupan menjelang penerapan adaptasi kebiasaan baru. (Rul)-f

LOMBA MASKER KREATIF JOGJA ISTIMEWA 2020 Aman, Fashionable dan Nyaman Jadi Juara



Model mengenakan masker karya Finalis Lomba Masker Kreatif Jogja Istimewa. KR-Juvintarto

DENGAN model, pola masker berlapis yang aman sesuai protokol kesehatan (prokes), *fashionable*, dan nyaman dikenakan, Retno Wulandari warga Tahunan UH Yogya berhasil meraih Juara I Lomba Masker Kreatif Jogja Istimewa 2020, yang dihelat di Galeria Mall, Yogyakarta, Sabtu (5/12).

Lomba digelar Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, diikuti 350 peserta khusus KTP DIY, dan 50 peserta masuk final. "Karya peserta sebelumnya juga diikuti dalam Pameran Masker Indonesia 29 November - 5 Desember 2020 di Lt 1 Galeria Mall," tutur Ketua Panitia dari Dekranasda DIY, Indah Rahayu Murnihati, kepada KR usai lomba.

Murni menyebutkan lomba dengan melihat masker sebagai potensi di masa pandemi Covid-19 yang bisa digali. "Prokes wajib bermasker, lomba untuk meningkatkan produktivitas, kreatifitas, dan inovasi masyarakat/perajin di masa pande-

mi," jelasnya.

Finalis kemudian dinilai Tim Juri terdiri dari Ketua Philip Iswandono dengan anggota Octo Lampito, Delia Murwihartini, Kaelesha Afianti, dan RA Sekartaji Suminto SSn Msn hingga terpilih 11 pemenang dari Juara I-Harapan III, dan Favorit I-V. "Hasil karya pemenang jadi milik panitia dan bisa diproduksi dengan kerja sama bisnis," ujarnya.

Selanjutnya Juara II-Harapan III berturut-turut Fatonah Winisari (Gunungketur, PA Yogya), Arum Sutrisni (Srandakan, Bantul), Kania Gitaswari (Jalan KHA Dahlan Yogya), Lina Wahyuningsih (Giripanggung, Tepus, Gunungkidul), Ilham Kurniawan (Prawirodirjan, Gondomanan, Yogya).

Selain uang pembinaan dan piagam, Juara I-III juga mendapat trofi dari GKR Hema, GKBRAA Paku Alam X, Kepala Dinas Perindag DIY. (R-4) -f

KENDALIKAN COVID-19

Kegiatan Masyarakat Diperketat

TEMANGGUNG (KR) - Pemkab Temanggung melakukan pengetatan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penularan Covid-19 yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan. Saat ini 549 kasus aktif Covid-19 di Temanggung, dengan 474 orang menjalani isolasi mandiri dan 75 dalam perawatan rumah sakit.

Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Temanggung Gotri Wijiyo mengatakan, Satgas Covid-19 Desa hingga RW dan Jogo Tonggo sangat berperan dalam pengendalian kegiatan masyarakat di tingkat bawah guna mencegah penularan Covid-19.

"Mereka harus berani menegakkan disiplin warga dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Banyak kegiatan di masyarakat yang harus mendapat perhatian serius," kata Gotri, Sabtu (5/12).

Dikemukakan, pada kegiatan masyarakat dicegah terjadi kerumunan dan dalam suatu kegiatan dibatasi maksimal 50 orang dengan penerapan prokes ketat. Satgas Covid-19 langsung mendatangi lokasi dan mereka yang melanggar aturan tidak segan diproses hukum. "Telah banyak kluster Covid-19, bahkan sudah tidak tahu yang mana penekanannya. Yang terbaik kini adalah mulai mendisiplinkan diri pada protokol kesehatan kembali," tegasnya.

Dikatakan Gotri, rapat-rapat di instansi Pemerintah kini menggunakan vidcon dan dibatasi maksimal 25 orang atau disesuaikan kondisi ruangan. Harapannya tidak ada penularan. Kluster di masyarakat kebanyakan dari kegiatan masyarakat seperti takziah, hajatan dan pengajian.

Gotri mengatakan, telah ada kerja sama dengan Pengurus Dewan Masjid. Isinya penyampaian sosialisasi terkait prokes, imbauan pada masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan prokes serta mengantisipasi terjadinya kerumunan. (Osy)-f

Bulan Dana PMI untuk Penanganan Covid-19

PURWOKERTO (KR) - Kegiatan Bulan Dana PMI Banyumas Tahun 2020 yang dimulai 28 Oktober hingga 31 Desember 2020 dikhususkan untuk penanganan bencana non-alam Covid-19.

Ketua Panitia Bulan Dana PMI Banyumas yang juga Kajari Purwokerto Sunarwan saat melakukan sosialisasi Bulan Dana PMI di Kantor Pendidikan Kabupaten Banyumas, Sabtu (5/12) mengatakan, target pengumpulan Bulan Dana PMI tahun ini Rp 1,87 miliar. Pengumpulan dana itu melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN dengan melibatkan instansi pemerintah, pelaku usaha, wajib pajak kendaraan, dan masyarakat umum.

Bagi masyarakat umum yang ingin menyumbangkan uangnya bisa menggunakan aplikasi Qris, sehingga sangat mudah. "Silakan masyarakat untuk peduli menyisihkan uangnya demi kemanusiaan melalui aplikasi Qris," pintanya.

Ketua PMI Cabang Banyumas Dibyo Yuwono menambahkan, dana yang terkumpul hingga saat ini sudah mencapai Rp 300 juta. Dana sebanyak itu belum termasuk yang langsung masuk aplikasi Qris.

Dibyo optimis target Bulan Dana PMI tahun ini bisa tercapai. Sedangkan pemasukan terbesar seperti pada tahun sebelumnya di sejumlah kecamatan dengan melibatkan pegawai dan masyarakat hingga Rp 700 juta. (Dri)-f